

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan milik Negara/Daerah, terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Seiring dengan beralihnya pemerintahan dari pemerintahan orde baru menjadi era reformasi sudah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang salah satunya adalah Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Perubahan SAP (2010) dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju basis akrual yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi, pendapatan, belanja dan pembiayaan sedangkan basis akrual untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setelah dikeluarkan PP No 71 Tahun 2010 Penerapan secara langsung basis akrual membutuhkan daya dukung teknologi serta sumber daya manusia (SDM) atau aparat yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai, atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi di pemerintahan

daerah. Namun sampai tahun anggaran 2014 masih ada pemerintahan yang belum menerapkan basis akrual dalam pengelolaan keuangan.

Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Badan Audit dalam hal ini BPK memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual, BPK menjadi pihak yang akan menilai penerapan SAP berbasis akrual yang tercermin pada laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk salah satu pemerintah daerah yang belum menerapkan SAP berbasis akrual hingga T.A 2014. Selama 5 tahun terakhir Kabupaten Gorontalo masih menerapkan SAP kas menuju akrual dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan berikut ini adalah hasil opini atas LKPD Kabupaten Gorontalo dari tahun 2010-2014:

Tabel 1: Hasil Opini LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2010-2014

Tahun	Opini
2010	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Data: Olahan 2016

BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2014 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. BPK berpendapat informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah

cukup andal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan reformasi dibidang keuangan daerah.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo masih dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi dalam proses pencatatannya masih menggunakan basis kas. Sedangkan tahun 2015 berjalan pemerintahan Kabupaten Gorontalo baru menerapkan proses pencatatan berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan dan sekarang masih belum ada hasil apakah masih bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penggunaan akrual basis dalam pencatatan. Walaupun belum ada hasil dari opini BPK, DPPKAD tetap optimis mempertahankan WTP.

Sehingga pada saat ini merupakan masa persiapan dan peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pernyataan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah menerapkan SAP berbasis akrual ini akan timbul. Hal ini yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Kompetensi staf (PNS) secara umum berarti kemampuan dari karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Suprpto, 2002).

Karakteristik kompetensi itu muncul dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparansi, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik dipusat maupun di daerah. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan sumberdaya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah (Thahier, 2012).

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru. Khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. Keberhasilan ataupun kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi (Kusuma, 2013).

Pemerintah Kabupaten Gorontalo sekarang telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemandagri Nomor 64 Tahun 2013 menjelaskan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Sementara itu dalam laporannya Kepala Dinas PPKAD menjelaskan bahwa

terkait kesiapan pelaksanaan standar akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan beberapa aspek penunjang dalam pelaksanaan standar akuntansi berbasis akrual baik dari kesiapan regulasi terkait kebijakan akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual, bagan akun standar (BAS) maupun kesiapan aplikasi penunjang berupa simda versi akrual, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Pemerataan pengembangan sumberdaya aparatur memulai pendekatan analisis praktis. Dimana penempatan dan pengangkatan dalam jabatan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hasil penilaian kompetensi pada masing-masing orang. Selain itu, dengan adanya kompetensi ini, maka penempatan dan pengangkatan PNS akan lebih mudah dilakukan karena dilihat dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki pegawai itu. Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kompetensi PNS Badan Kepegawaian Negara menjelaskan tujuan dari penilaian kompetensi ini adalah dapat digunakan sebagai alat atau promosi jabatan atau mutasi jabatan, yang kedua dapat digunakan untuk pengembangan pegawai. Menurutnya, penilaian kompetensi cukup penting untuk lebih mengenyot kualitas kerja aparatur. (www.InfoPublik.Com)

Kompetensi staf akuntansi sangat berpengaruh pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual karena menyangkut bagaimana melakukan suatu pencatatan akuntansi pada pemerintahan, sebagaimana diungkapkan oleh Bastian (2009: 123) yaitu mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Salah satu indikator sumber daya berkualitas adalah tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas terutama. Untuk itu perlu dibutuhkan orang-orang yang lebih tahu mengenai akuntansi dalam

pencatatan yang menggunakan akrual basis. Menurut Samsudin (2010: 107) yaitu pengembangan sumber daya manusia adalah menyiapkan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Perkembangan juga membantu para karyawan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya peraturan baru dan teknologi baru.

Persiapan telah dilakukan oleh Dinas PPKAD dalam pengimplementasian atau penerapan sistem akuntansi akrual tersebut, diantaranya memberikan pelatihan lebih awal, penyiapan teknologi informasi, persiapan dana yang dibutuhkan. Untuk persiapan Pemerintah Kabupaten diselenggarakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan berbasis akrual, dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada umumnya serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo yang bersesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Faradilah (2013) dalam penelitiannya menganalisis tentang persiapan pemerintah Kota Makasar untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mashudi (2013) yang berjudul analisis kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa Pemkab Bondowoso cukup siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual.

Penelitian yang dilakukan Arliana (2011) yang berjudul implementasi akuntansi berbasis akrual pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Makasar. Penelitian sebelumnya oleh Astuti (2015) yang meneliti di Provinsi Gorontalo tepatnya BPKAD dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Terhadap Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP IMPLEMENTASI PP NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG SAP BERBASIS AKRUAL (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo)”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Astuti (2015) yaitu selain lokasi dan sampel yang berbeda ada juga dalam variabel Y mengenai implementasi PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yaitu oleh Astuti lebih pada PSAP 07 tentang aset tetap sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas dan PSAP 12 tentang laporan operasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian, sebagai berikut:

1. SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan.
2. Dalam Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI membutuhkan sumber daya manusia yang paham tentang akuntansi berbasis akrual.
3. Dalam meningkatkan kualitas aparatur lewat kompetensi masih kurangnya pelatihan yang dilakukan pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Apakah kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap implementasi PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap implementasi PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini lebih menggambarkan tentang teori kesiapan (*Readiness Theory*) dan juga memberikan gambaran mengenai kompetensi dalam implementasi PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal implementasi PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.